



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: PAN Siapkan Pengganti Taufik
Tanggal	: Sabtu, 03 November 2018
Surat Kabar	: Indo Pos
Halaman	: 3

PAN Siapkan Pengganti Taufik

KPK Lakukan Penahanan Selama 20 Hari

JAKARTA—Partai Amanat Nasional (PAN) telah mengadang-gadang dua nama menduduki kursi Wakil Ketua DPR RI. Mereka yakni, Wakil Ketua Fraksi I DPR RI, Hanafi Rais dan Ketua Fraksi PAN DPR RI, Mulfachri Harahap. Pasalnya, Taufik Kurniawan telah ditahan oleh KPK atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo mengatakan, ada dua nama yang muncul sebagai pengganti Taufik dalam pemicaraan tidak resmi. Keduanya adalah Wakil Ketua Komisi I, Hanafi Rais dan Ketua Fraksi AN, Mulfachri Harahap. "Saat ini belum ada embahasan resmi di PAN tentang posisi Mas

Taufik di DPR. Kalau dalam obrolan-obrolan memang muncul dua nama, yaitu Ketua Fraksi PAN DPR RI Mulfachri Harahap dan Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais," ujar Dradjad saat dihubungi, Jumat (2/11).

Di sisi lain, lanjut Dradjad, muncul pula pandangan Taufik masih dapat menjabat sebagai Wakil Ketua DPR hingga kasusnya berkekuatan hukum tetap. Selain itu, faktor efektivitas juga menjadi pertimbangan yang kurang dari satu tahun dan terpotong kampanye hingga April, juga menjadi pertimbangan," kata Dradjad.

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengatakan, posisi Taufik Kurniawan sebagai caleg dari PAN tidak bisa diganti oleh orang lain. Namun, nama Taufik tetap bisa dicoret dari daftar caleg tetap (DCT) jika ada putusan hukum

yang sudah inkrah atas kasusnya saat ini. "Pencalonannya tidak bisa diganti," ujar Arief ketika dijumpai wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/11).

Taufik, kata Arief, merupakan calon legislatif dari Partai Amanat Nasional. Dalam DCT, Taufik Kurniawan masuk di Daerah Pemilihan (dapil) VII Jawa Tengah. Selain itu, untuk saat ini nama Taufik Kurniawan tidak bisa dicoret dari DCT. Akan tetapi, jika nanti ada kondisi perkembangan proses hukum, namanya masih berpeluang untuk dicoret dari DCT. "DCT sudah tidak bisa berubah kecuali karena hal yang bisa menyebabkan perubahan. Misalnya si caleg meninggal. Kemudian jika ada putusan hukum yang sudah inkrah dan dia (caleg) dinyatakan tidak memenuhi syarat," jelas Arief.

Namun, Arief mengatakan, putusan inkrah itu juga akan dilihat waktunya. Jika surat



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

suara sudah diproduksi, kemudian sudah ada putusan yang inkrah, maka caleg bisa diluarkan dari DCT. "Tapi kalau surat suara sudah diproduksi, dia (caleg, red) tidak bisa keluarkan (dari DCT, red). Hanya saja nanti diberitahukan kepada pemilih bahwa caleg ini telah inkrah putusannya. Berdasarkan ketentuan, kalau sudah ikrah itu tidak memenuhi syarat (sebagai caleg, Red)," tegas Arief.

Informasi yang dihimpun, Taufik Kurniawan akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini politikus PAN itu sudah berada di dalam gedung KPK. Wakil Ketua Umum PAN itu langsung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. "Sekitar pukul 09.00 pagi ini tersangka TK datang ke KPK. Saat ini sedang di ruangan pemeriksaan," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

saat dikonfirmasi, Jumat (2/11).

Febri mengatakan, Taufik resmi memakai rompi tahanan KPK dan ditahan selama 20 hari pertama seelah keluar dari lobi KPK pada pukul 18.19. "Tersangka TK ditahan selama 20 hari pertama di Rutan KPK C-1," lanjutnya.

Taufik Kurniawan sebelumnya dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK. Taufik tak hadiri pemeriksaan pada 25 Oktober dan 1 November 2018 kemarin. KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad. Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya. (aen)
